



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIES FHARIANDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 474593

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/225 m² di KAB / KOTA KARIMUN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m²/250 m² di KAB / KOTA KARIMUN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/200 m² di KAB / KOTA KARIMUN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 953 m²/370 m² di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 753.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 11B1D M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1500 S AT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. LAINNYA, POLYGON RAYZ 24 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000



6.	MOTOR, HONDA K1H02N14L0 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI	
	Rp. 17.000.000	
7.	MOTOR, HONDA NF 12A1CF MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI	
	Rp. 7.000.000	
8.	MOBIL, HONDA NEW CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp. 495.000.000
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 4.500.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp. ---
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp. 1.456.915.591
F.	HARTA LAINNYA	Rp. ---
Sub Total		Rp. 3.914.415.591
III. HUTANG		Rp. ---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp. 3.914.415.591

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.